

KEBIJAKAN JOKOWI DALAM PENANGANAN KABUT ASAP

DI INDONESIA TAHUN 2015



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

Oleh :

APRILLIA AYU SAPUTRI

12370011

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Peristiwa bencana kabut asap yang terjadi tahun 2015 lalu merupakan sebuah kesempatan untuk menilai sejauh mana kepemimpinan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Jokowi dalam menanggulangi bencana kabut asap tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja Jokowi sebagai seorang pemimpin yang dilihat melalui teori kepemimpinan dalam Islam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, koran harian, internet, dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah berita dan informasi yang mempunyai relevansi serta berkaitan langsung dengan objek yang dikaji. Sedangkan, data sekunder dihimpun dari berbagai temuan berupa literatur, dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan pendekatan normatif dan menggunakan analisis deduktif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan presiden Jokowi dalam menanggulangi bencana kabut asap ini diantaranya, memperpanjang penundaan pemberian izin, melakukan pemadaman titik api dengan metode bom air dan bom kimia, melakukan operasi tanggap darurat, memberikan instruksi pencabutan izin usaha pada perusahaan yang terbukti sebagai penyebab terjadinya bencana tersebut, membentuk 9 langkah jangka panjang untuk mengatasi masalah yang berulang ini, melakukan tinjauan langsung (blusukan) ke lokasi bencana, meminta bantuan kepada negara tetangga, memberikan berbagai macam instruksi khusus kepada beberapa menteri, menggelar operasi kemausiaan untuk mengevakuasi para korban.

Berdasarkan data yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang teori kepemimpinan dalam Islam, sebagai seorang pemimpin Presiden Jokowi telah berusaha untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada. Akan tetapi dalam menanggulangi masalah kabut ini, penulis menilai bahwa Presiden Jokowi kurang cepat dan kurang berani mengambil resiko dalam langkah-langkah penanggulangannya.

Key Words : Jokowi, Kabut Asap, Kebijakan, Kepemimpinan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprillia Ayu Saputri
NIM : 12370011
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN JOKOWI DALAM PENANGANAN KABUT
ASAP DI INDONESIA TAHUN 2015

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 April 2016

Penyusun



APRILLIA AYU SAPUTRI

NIM 12370011



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprillia Ayu Saputri

NIM : 12370011

Jurusan : Siyasa

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqasyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian terdapat sesuatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 April 2016

Yang Menyatakan



NIM. 12370011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Aprillia Ayu Saputri

NIM : 12370011

Judul : KEBIJAKAN JOKOWI DALAM PENANGANAN KABUT ASAP
DI INDONESIA TAHUN 2015

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Yogyakarta, 28 April 2016

Pembimbing

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: Un.02/DS/PP.00.9/175/2016

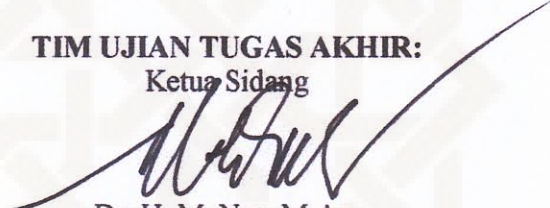
Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN JOKOWI DALAM PENANGANAN
KABUT ASAP DI INDONESIA TAHUN 2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : APRILLIA AYU SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 12370011
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:
Ketua Sidang

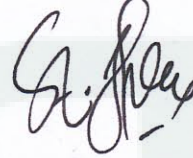

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002


Penguji II



Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 17 Mei 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	(H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka-ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er-
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es-ye
ص	ād)S	(S	es (dengan titik di bawah)

ض	ād(D	(D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	(T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	(Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---	<i>Fathah</i>	A	A		
---	<i>Kasrah</i>	I	I	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
'---	<i>Dammah</i>	U	U		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و---	<i>Kasrah</i>	I	I	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

3. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'ā</i>
Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

E. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

F. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

H. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

MOTTO

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal dari keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Cobaan disetiap langkahmu adalah pengawetnya, maka dari itu bersabarlah ! karena Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

(SUGIYANTO AZIZAH)

HALAMAN PERSEBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberi dukungan, nasehat, motifasi, kasih sayang dan semua pengorbanan yang tidak akan pernah tergantikan, juga untuk kedua adikku tersayang, terima kasih untuk semua kebersamaan dan perhatiannya selama ini. Semoga saya bisa membanggakan dan menjadi teladan untuk kalian.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman dan seluruh keluarga besar Prodi Siyasah yang dari awal hingga akhir selalu memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan bisa menjadi berkah dan dapat bermanfaat untuk semuanya, Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله واصحابه ومن تبعهم
بإحسان الى يوم القيامة. اما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpah-kan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan seluruh umat dunia. Amiiin

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Kebijakan Jokowi Dalam Penanganan Kabut Asap Di Indonesia Tahun 2015” bukan merupakan karya penyusun semata, bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak mempunyai andil besar dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara dan Politik Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum; Dosen Pembimbing Akademik, dan Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini;

4. Ibu Siti Jahroh, Pak Naryo dan seluruh dosen/pengajar yang telah ikhlas men-transfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang penulis peroleh;
5. Orang Tua (Bapak Edison P dan Ibu Tuti Utaminingsih) dan adik (Riskyta Fala Shalsyabil dan Nurul Aini Azzara) tercinta, terima kasih atas doa serta dukungan yang tiada henti;
6. Bapak Muhammad Joni Yulianto (Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)) yang berkenan memberikan waktu untuk diskusi
7. Kepada seluruh angkatan 2012 Jurusan Siyasah yang telah menemani menjalani setiap kegiatan perkuliahan;
8. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada Penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermamfaat dari Allah swt.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkannya.

Aamiin ya Rabbal'Alamin

Yogyakarta, 20 April 2016

Penyusun

Aprillia Ayu Saputri

NIM 12370011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM	19
A. Arti Pemimpin dan Kepemimpinan.....	19
B. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Islam	22
C. Fungsi dan Tipe Kepemimpinan dalam Islam	24
BAB III POTRET BENCANA ASAP TAHUN 2015 DAN RESPON JOKOWI.....	35
A. Bencana Asap di Indonesia	35
1. Sejarah Bencana Asap di Indonesia.....	35
2. Aturan atau Dasar Hukum Pembakaran Lahan	40
B. Sebaran dan Dampak Bencana Asap	44
C. Langkah dan Kebijakan Jokowi Dalam Bencana Asap	60
BAB IV KEBIJAKAN JOKOWI DALAM PENANGANAN KABUT ASAP DALAM TAKARAN SIYASAH	70
A. Dimensi Cepat Tanggap.....	70
B. Dimensi Pengambilan Keputusan.....	72
C. Dimensi Pengambilan Resiko	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Daftar Dasar Hukum Pembakaran Lahan	II
3. Daftar Data Berita Online dan Koran.....	VII
4. Curriculum Vitae.....	XI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Jumlah sebaran Hotspot Tahun 2014 dan 2015	46
Tabel 2. Status Bencana Asap Akibat Kebakaran Lahan dan Hutan	49
Tabel 3. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Titik Panas Di Provinsi Riau Tahun 2015 (periode Januari-Sepetember	45
Gambar 2. Citra Satelit Himawari Sebaran Asap (Periode 4 oktober 2015)....	46
Gambar 3. Citra Satelit Himawari Sebaran Asap (Periode 5 oktober 2015)....	47
Gambar 4. Citra Satelit Himawari Sebaran Asap (Periode 6 oktober 2015)....	47
Gambar 5. Sebaran Asap ke Negara Tetangga (Periode 6 oktober 2015).....	48
Gambar 6. ISPU Tertinggi di 6 Provinsi Terdampak Asap Periode September-Oktober 2015.....	52
Gambar 7. Proporsi Penyakin Dampak Asap di Provinsi Riau Periode 29 Juni-29 Oktober 2015.....	53
Gambar 8. Jumlah Kasus ISPA Akibat Asap di 6 Provinsi Periode Juli-Oktober 2015.....	54
Gambar 9. Ilustrasi Kerugian Negara.....	59
Gambar 10. Bom Air yang dilepaskan di atas lahan terbakar di Riau, Jum'at 31 Juli 2015	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik adalah keadaan suatu negara dimana pemerintahan berasal dari rakyat, bukan berdasarkan keturunan dari bangsawan. Negara republik dikepalai atau dipimpin oleh seorang presiden. Karena Negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang menerapkan sistem presidensial, maka presiden memiliki dua fungsi yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.¹

Negara Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian presiden. Presiden yang ke-7 adalah Ir. H. Joko Widodo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu. Sebagai seorang pemimpin tentunya seorang presiden mempunyai tugas yang wajib untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah mengambil sebuah kebijakan atau keputusan guna menyelesaikan suatu persoalan.

Setiap pemimpin pasti dihadapkan dengan berbagai hal yang terjadi di negaranya, baik berupa peristiwa yang membanggakan ataupun peristiwa yang tidak pernah diinginkan untuk terjadi. Salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia tahun lalu adalah bencana kabut asap. Setiap tahun Indonesia dilanda kebakaran hutan dan kabut asap. Tapi tahun lalu polusi udara yang disebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan bisa mencatat rekor baru. Api yang mendekap kedua pulau di tanah air itu berpotensi menjadi yang paling parah dan

¹ “Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan”, <http://UniversitasCiputraEntrepreneurshipOnline.htm>. Akses 28 Oktober 2015.

Paling lama menyusul fenomena El Nino² yang membuat kondisi cuaca menjadi lebih kering dan menghambat turunnya hujan. Ilmuwan NASA meyakini, situasi tahun ini serupa dengan tahun 1997 yang tercatat sebagai bencana kabut asap paling parah dalam sejarah. "Jika perkiraan cuaca yang memprediksi kemarau panjang bertahan, ini akan membuat kabut asap 2015 termasuk yang paling parah dalam sejarah."³

Sejak tanggal 1 Juli 2015 – 20 Oktober 2015 tercatat sebanyak 2.708.485 hektar lahan telah terbakar.⁴ Hal itu menyebabkan timbulnya asap yang sangat mengganggu dalam berbagai bidang. Pembakaran lahan tersebut bukanlah hal yang tidak diketahui oleh pemerintah dan masyarakat Sumatera dan Kalimantan itu sendiri. Sebab pembukaan lahan baru dengan metode pembakaran lahan gambut telah mendapatkan legalitas dari pemerintah.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dua peraturan tingkat pusat yaitu; Pertama, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan/Lahan. Pada pasal 4 ayat (1) yang

² El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru – Ekuador (Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global). Biasanya suhu air permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya up-welling (arus dari dasar laut menuju permukaan). Menurut bahasa setempat El Nino berarti bayi laki-laki karena munculnya di sekitar hari Natal (akhir Desember). Di Indonesia, angin monsun (muson) yang datang dari Asia dan membawa banyak uap air, sebagian besar juga berbelok menuju daerah tekanan rendah di pantai barat Peru – Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang.

³ "NASA : Kabut Asap Indonesia Terparah Dalam Sejarah" <http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam-sejarah.html>, Akses 13 Oktober 2015.

⁴ Data ini dikeluarkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

berbunyi “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69, Ayat 2 menyebutkan “membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing”.⁵

Legalitas untuk membuka lahan baru dengan cara membakar juga terdapat pada peraturan tingkat daerah diantaranya, Provinsi Kalimantan Tengah memberikan izin pembukaan lahan dengan cara membakar melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan, dan Lingkungan Hidup juga membolehkan pembakaran lahan untuk pertanian, perkebunan, dan perladangan. Syarat pembakaran diatur melalui Pasal 3 Ayat 4 ketentuan mengenai perizinan pembakaran lahan diatur peraturan tingkat desa dan kabupaten terkait hak ulayat.⁶

Dampak yang terjadi akibat adanya pembakaran lahan tersebut sangatlah banyak dan merugikan masyarakat luas. Kualitas udara yang memburuk sangat mempengaruhi kesehatan, jarak pandang yang sangat minim menghambat aktifitas

⁵ “Aturan Ini Izinkan Pembakaran Hutan dan Lahan”, <http://TempoNasional.htm>. Akses Tanggal 28 Oktober 2015.

⁶ *Ibid.*

dalam berbagai bidang diantaranya bidang pendidikan yang terpaksa diliburkan mengingat asap yang dapat merusak kesehatan murid dan guru. Selain itu asap juga mempengaruhi bidang ekonomi, karena banyak masyarakat yang terhambat mata pencahariannya. Secara makro dampak asap juga mempengaruhi pendapatan negara melalui sektor pariwisata, karena bandara ditutup dan kualitas udara memburuk menyebabkan para wisatawan enggan berkunjung ke Sumatera dan Kalimantan. Selain berbagai dampak di atas, terdapat satu hal yang sangat mempengaruhi citra Negara Indonesia dimata dunia, hal ini dikarenakan kabut asap yang terjadi akibat pembakaran lahan di Indonesia telah mencapai negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand.

Sebagai seorang pemimpin, presiden berposisi sebagai pengambil tindakan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan ataupun langkah-langkah yang diambil sebaiknya dapat memperkecil dampak bahkan harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi setiap tahun ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melihat kebijakan apa saja yang telah dilakukan Jokowi dalam menghadapi masalah pembakaran lahan dan kabut asap ini. Selain itu penulis juga ingin melihat bagaimana kinerja Jokowi sebagai seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan guna menyelesaikan masalah ini melalui perspektif fikih siyasah khususnya teori kepemimpinan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Langkah apa yang dilakukan Jokowi dalam menangani kabut asap tahun 2015 ?
2. Bagaimana kinerja Jokowi sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi dan menangani kabut asap, dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan langkah yang telah dilakukan Jokowi sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi bencana asap tahun 2015 ini.
 - b. Menjelaskan pandangan fikih siyasah khususnya teori kepemimpinan dalam Islam terhadap kinerja Jokowi sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi bencana asap tahun 2015 ini.
2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- a. Untuk memperkaya kanzah keilmuan, khususnya dalam domain kepemimpinan dan politik yang sesuai dengan aturan negara dan ajaran agama Islam.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang kepemimpinan dalam Islam khususnya.

- c. Menjadikan evaluasi bagi semua pemimpin pada umumnya dalam menjalankan tanggungjawabnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti yang akan disusun lakukan. Diskursus kepemimpinan negara dalam suatu tata pemerintahan, telah sejak lama menjadi bahasan para pemikir politik baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui, belum ditemukannya karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sesekali terdapat karya ilmiah dalam bentuk artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, skripsi Dessy Alvira Iralita tentang “perilaku politik Joko Widodo sebagai presiden dalam 100 hari”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan kepemimpinan Jokowi dalam seratus hari masa jabatan sebagai presiden ke-7 Indonesia. Bahasan utama dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana perilaku sosial seorang pemimpin dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil.⁷ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana kinerja pemimpin (Jokowi) dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi suatu masalah dari prespektif kepemimpinan dalam Islam.

Kedua, jurnal karya M. Yusuf A. R. tentang “Fenomena Kepemimpinan Politik Jokowi”. Jurnal tersebut membahas tentang gaya kepemimpinan yang

⁷Dessy Alvira Iralita, “Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden dalam 100 Hari”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dimiliki oleh Jokowi sebagai seorang pemimpin. Gaya tersebut adalah gaya kepemimpinan transformasional yang tampak dari kemampuan dirinya membawa birokrasi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.⁸ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana kinerja pemimpin (Jokowi) dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi suatu masalah dari perspektif kepemimpinan dalam Islam.

Ketiga, skripsi Gunawan Muhammad tentang “Karakter Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Imam Khomeini dan Al-Mawardi)”. Skripsi ini membahas tentang syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang harus terpenuhi untuk menjadi seorang pemimpin yang dikualifikasikan oleh Imam Khomeini dan al-Mawardi. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah tegak dan jayanya suatu negara sangatlah ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin, apabila seorang pemimpin adalah orang yang benar-benar memiliki kepemimpinan dan memiliki kriteria-kriteria yang diperlukan bagi seorang pemimpin, maka hal itu dapat dijadikan ukuran dan jaminan akan kelangsungan sebuah negara.⁹ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana kinerja pemimpin (Jokowi) dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi suatu masalah dari perspektif kepemimpinan dalam Islam.

⁸M. Yusuf A. R., “Fenomena Kepemimpinan Politik Jokowi”, dalam *jurnal GaneÇ Swara* Fak. Ilmu Sosial dan Politik Univ. 45 Mataram, Vol. 7, No.1, (Tahun 2013).

⁹Gunawan Muhammad, “Karakter Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Imam Khomeini dan Al-Mawardi)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Keempat, skripsi Maszofi tentang “Konsep Pemimpin dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-‘Uyun Karya Abu Hasan Bin ‘Ali Muhammad Al-Mawardi (975-1059). Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam al-Mawardi terhadap permasalahan kepemimpinan yang terkait dengan konsep kepemimpinan sehingga dapat merumuskan karakter ideal seorang pemimpin. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan Islam merupakan sistem kepemimpinan yang menitikberatkan pada esensi substansial ke-Islaman.¹⁰ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana kinerja pemimpin (Jokowi) dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi suatu masalah dari perspektif kepemimpinan dalam Islam.

Kelima, skripsi Dwi Wahyuni dengan judul “Permasalahan Kabut Asap dalam Hubungan Indonesia dan Malaysia Pada Periode 1997-2006”. Skripsi ini menganalisis bagaimana pengaruh permasalahan kabut asap terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia.¹¹ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana kinerja pemimpin (Jokowi) dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi bencana kabut asap dari perspektif kepemimpinan dalam Islam.

Keenam, jurnal karya Rizca Putri yang berjudul “Bencana Tahunan Kabut Asap Riau dalam Pandangan Politik Hijau”. Jurnal tersebut membahas

¹⁰ Maszofi, “Konsep Pemimpin dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-‘Uyun Karya Abu Hasan Bin ‘Ali Muhammad Al-Mawardi (975-1059)”, *skripsi* Fakultas Ushuludin, Jurusan Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹¹ Dwi Wahyuni, “Permasalahan Kabut Asap dalam Hubungan Indonesia dan Malaysia Pada Periode 1997-2006”, *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

tentang bencana kabut asap yang dilihat dari segi pencapaian kepentingan yang merusak lingkungan dan adakah unsur-unsur politik yang mempengaruhi.¹² Berbeda dengan jurnal di atas, karena dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana kinerja pemimpin (Jokowi) dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menghadapi bencana kabut asap dari perspektif kepemimpinan dalam Islam.

Selain artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, penyusun juga akan menggunakan referensi yang dapat dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang dapat dijadikan rujukan antara lain, sebagai berikut :

Pertama, buku karya Prof. Dr. H. Hadari Nawawi yang berjudul “*Kepemimpinan Menurut Islam*”, diterbitkan di Yogyakarta oleh Gadjah Mada University Press.¹³ Buku ini berisi tentang kedudukan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, tugasnya sebagai khalifah itu mengharuskan manusia untuk melakukan interaksi terhadap sesamanya, sesuai dengan hakekat dirinya sebagai makhluk sosial. Disisi lain buku ini juga membahas tentang, umat Islam yang memerlukan pengorganisasian dengan kepemimpinan yang beriman. Untuk itu dari generasi ke generasi umat Islam memerlukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas berdasarkan keteladanan Rasulullah SAW.

Kedua, buku karya Drs. EK. Imam Munawwir yang berjudul “*Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*”, diterbitkan di Surabaya oleh USAHA

¹²Rizca Putri, “Bencana Tahunan Kabut Asap Riau dalam Pandangan Politik Hijau”, dalam *JurnalPhobi* Vol.1/ No.3/ 20 Maret 2014.

¹³Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993). Cetakan ke-1.

NASIONAL.¹⁴ Buku ini berisi tentang bagaimana kondisi umat Islam di Indonesia, kepemimpinan Islam yang dijabarkan melalui dasar-dasar/pokok dalam pengangkatan pemimpin menurut Prinsip Islam, tujuan kepemimpinan dalam Islam dan karakteristik kepemimpinan Islam. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai persyaratan yang harus terpenuhi oleh seseorang untuk menjadi pemimpin.

Ketiga, buku karya Drs. Pandji Anoraga yang berjudul "*Psikologi Kepemimpinan*", diterbitkan di Jakarta oleh PT. Rineka Cipta.¹⁵ Buku ini mengkaji tentang pemimpin dan kepemimpinan dari sudut psikologi baik secara teoritis maupun praktis. Didalamnya terdapat kajian mengenai keputusan yang idealnya/sebaiknya diambil oleh pemimpin dalam menghadapi suatu persoalan. Selain itu, buku ini juga mengkaji tentang kemampuan-kemampuan yang sebaiknya dimiliki pemimpin.

Keempat, buku karya Prof. DR. Mar'at yang berjudul "*Pemimpin dan Kepemimpinan*", diterbitkan di Jakarta oleh Ghalia Indonesia.¹⁶ Dalam buku ini akan diungkapkan tentang berbagai teori kepemimpinan dan tipe kepemimpinan dengan pandangannya masing-masing berdasarkan kriteria keberhasilan seseorang yang dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Uraian mengenai kepemimpinan secara umum tersebut dapat dijadikan bahan studi dalam mengaplikasikan kepemimpinan yang baik dan bersifat universal.

¹⁴EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya: USAHA NASIONAL,).

¹⁵Pandji Anoraga, *Psikologi Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992). Cetakan ke-2.

¹⁶Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). Cetakan ke-1.

Kelima, buku karya Dr. J. Riberu yang berjudul “*Dasar-Dasar Kepemimpinan*”, diterbitkan di Jakarta oleh CV.Pedoman Ilmu Jaya.¹⁷ Dalam buku ini selain membahas pengertian yang berhubungan dengan kepemimpinan juga membahas tentang tiga tugas utama seorang pemimpin yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam enam pola kebijakan. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai sikap batin dan lahir mana yang perlu dimiliki seorang pemimpin dari segi etika profesi serta etika seorang pemimpin.

E. Kerangka Teori

Topik kepemimpinan selalu menarik untuk diperbincangkan. Diskusi mengenai kepemimpinan seakan tak pernah basi. Hal ini karena masalah kepemimpinan senantiasa berkaitan erat dengan kehidupan sosial-politik, bahkan dengan kehidupan sehari-hari. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit untuk dipisahkan, karena tidak ada pemimpin tanpa kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa adanya pemimpin.¹⁸

Istilah kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata dasar “pimpin” (*lead*) yang berarti membimbing atau menuntun, setelah diberi awalan “pe” maka menjadi pemimpin yang dalam bahasa Inggris disebut *leader*. Apabila diakhiri dengan “an” maka menjadi “pimpinan”, ia akan bermakna sebagai pimpinan atau

¹⁷J. Riberu, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1992). Cetakan ke-4.

¹⁸ Khatib Pahlawan Karyo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 70.

orang yang mengepalai dan harus ditaati secara mutlak.¹⁹ Proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin disebut dengan kepemimpinan (*leadership*).

Konsep kepemimpinan erat kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan (*power*) adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Sedangkan wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Penggunaan wewenang timbul tatkala masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya.²⁰ Salah satu bentuk wewenang seorang pemimpin adalah mengambil sebuah kebijakan atau keputusan.

Kepemimpinan dalam Islam terkenal dalam istilah *khilafah Islamiah* atau bisa disebut juga dengan *immamah*. Sedangkan seorang kepala negara dalam Islam disebut dengan khalifah/imam. Seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia mempunyai peranan yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam segala masalah yang berkenaan dengan kebutuhan orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 237.

menggerakkan pihak lain agar dengan penuh pengertian dan kesadaran bersedia mengikuti kehendak pemimpin tersebut.²¹

Kepemimpinan dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan metode kepemimpinan yang selama ini umumnya dilakukan oleh pemimpin dalam organisasi. Dalam Islam sendiri, terdapat beberapa fungsi dari kepemimpinan sebagai bagian dari sebuah interaksi antar manusia. Yang *pertama*, fungsi Instruktif yaitu setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif. Karena seorang pemimpin yang memikul volume dan beban tugas untuk mengambil keputusan, akan kehilangan maknanya jika tidak dilaksanakan. Sedang untuk pelaksanaan pada umumnya tidak dilakukan sendiri oleh pemimpin sebagai pembuat keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam mewujudkan fungsi instruktif, agar kepemimpinannya berlangsung efektif. Seorang pemimpin harus menetapkan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana suatu perintah dilaksanakan.²²

Kemudian fungsi yang *kedua*, fungsi Konsultatif yakni pemimpin perlu melakukan konsultasi dengan anggotanya, baik secara terbatas maupun meluas sebelum keputusan ditetapkan. Lalu fungsi *ketiga*, fungsi partisipasi yaitu kesediaan pemimpin untuk ikut serta dalam pelaksanaan berbagai keputusan. Pemimpin tidak boleh sekedar mampu mengambil dan memerintahkan

²¹Pandji Anoraga, *Psikologi Kepemimpinan* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), hlm. 1-2.

²² Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 143.

pelaksanaan keputusan. Dalam batas tertentu pemimpin pun dapat dan perlu ikut serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan.²³

Fungsi *keempat*, adalah fungsi delegasi yakni setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri dalam usaha mewujudkan tugas pokoknya organisasinya, untuk itu pemimpin harus bersedia dan mampu menjalankan fungsi delegasi, yang dapat dilakukan dengan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada staf yang membantunya. Pemimpin harus mampu memberikan kepercayaan, sedang penerima delegasi harus mampu memelihara kepercayaan. Fungsi pendelegasian pada dasarnya berarti persetujuan atau pemberian izin pada anggota dalam posisi tertentu untuk menetapkan keputusan.²⁴

Fungsi *kelima*, fungsi pengendalian, yakni pemimpin harus berusaha agar tidak seorangpun anggotanya terlepas dari pengendaliannya dalam melaksanakan volume dan beban kerjanya masing-masing. Fungsi *keenam* atau fungsi terakhir, fungsi keteladanan dimana seorang pemimpin merupakan tokoh utama di lingkungan masing-masing. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi orang yang bersedia diangkat atau bersedia menjalankan peran sebagai pemimpin, selain harus menjalankan kepemimpinan yang patut diteladani.²⁵

Tujuan mulia kepemimpinan itu tidak akan tercapai jika pemimpin tidak dapat memenuhi kriteria atau syarat, kualitas dan sifat utama yang telah digariskan, khususnya menurut Islam. Para ilmuan mengemukakan beberapa kualitas dan sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin diantaranya,

²³ *Ibid.*, hlm. 146.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

mempunyai sifat intelegensi yang tinggi, dapat mengambil keputusan yang bijaksana, memiliki wewenang dan/imajinasi yang kaya, mempunyai kemampuan untuk menerima tanggung jawab, dapat bertindak jujur dan adil, serta memiliki kepribadian yang seimbang.²⁶

Sedangkan Iman al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, menjelaskan syarat seorang pemimpin negara. Diantaranya :

1. Pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan,
2. Seorang pemimpin negara haruslah orang yang mampu berbuat adil (*ai-Adil*),
3. Sehat mental dan fisik tidak cacat pendengaran, penglihatan, serta lisannya
4. Lengkap Anggota Badannya,
5. Cepat mengambil keputusan dan pandai bersiasat,
6. Pemberani.

Di sisi lain, menurut Ibnu Taymiyah seorang kepala negara haruslah orang yang secara obyektif betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dan janganlah seorang kepala negara terpengaruh oleh fakto-faktor yang subyektif seperti hubungan keluarga ataupun golongannya.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat

²⁶ *Ibid*, hlm.8.

²⁷ Qomarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* (Bandung: Pustaka ITB, 1983), hlm. 121.

dipertanggungjawabkan maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu. Untuk meneliti permasalahan di atas penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber-sumber informasi dan datanya dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun di tempat lainnya yang ada kaitan atau relevansinya dengan permasalahan penanggulangan kabut asap tahun 2015 lalu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang langkah apa saja yang telah dilakukan Jokowi sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi suatu bencana. Serta bagaimana kinerjanya sebagai pemimpin jika dilihat dari teori kepemimpinan dalam Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan metode meneliti dan melihat apakah hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam penanganan kabut asap tahun 2015 telah sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku didasarkan pada pemahaman terhadap aturan atau undang-undang dan teori yang ada.

²⁸ Sukadarrumidi, *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet.ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan dua langkah yaitu :

Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya buku tentang kepemimpinan dalam Islam dan berbagai berita media yang mempunyai relevansi dan kaitan langsung dengan obyek yang dikaji, seperti surat kabar dan berita online seputar kabut asap tahun 2015.

Kedua, data sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, seperti halnya buku-buku, artikel, internet, media masa, dan lain sebagainya.

5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif-kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh tersebut disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis praktek Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan terhadap penanggulangan bencana asap tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah kebijakan Jokowi terhadap bencana asap tahun 2015.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum bencana asap yang terjadi di Indonesia, mulai dari sejarah dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Serta menunjukkan langkah/kebijakan apa saja yang telah dilakukan presiden sebagai seorang pemimpin dalam menyikapi masalah bencana asap tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap pemimpin pasti dihadapkan dengan berbagai hal yang terjadi di negaranya, baik berupa peristiwa yang membanggakan ataupun peristiwa yang tidak pernah diinginkan untuk terjadi. Salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia tahun lalu adalah bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Sebagai seorang pemimpin, Presiden Jokowi telah melakukan berbagai langkah sebagai upaya penanganan masalah yang terus berulang ini.

Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin dalam penanggulangan tersebut diantaranya :

- Memperpanjang penundaan pemberian izin;
- Melakukan pemadaman titik api dengan metode bom air dan bom kimia;
- Melakukan operasi tanggap darurat;
- Memberikan instruksi pencabutan izin usaha pada perusahaan yang terbukti sebagai penyebab terjadinya bencana tersebut;
- Membentuk 9 langkah jangka panjang untuk mengatasi masalah yang berulang ini;
- Melakukan tinjauan langsung (blusukan) ke lokasi bencana;
- Meminta bantuan kepada negara tetangga;
- Memberikan berbagai macam instruksi khusus kepada beberapa menteri;
- Menggelar operasi kemausiaan untuk mengevakuasi para korban.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang pemimpin, Presiden Jokowi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi yang ada dalam sistem kepemimpinan, cepat, dan berani mengambil resiko dalam memutuskan sesuatu.

Berdasarkan data yang ada, tipe kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi adalah tipe kepemimpinan demokratis. Dalam pandangan perspektif siyasah sebagai seorang pemimpin dalam kepemimpinannya Presiden Jokowi telah berusaha untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada. Akan tetapi dalam menanggulangi masalah kabut ini, penyusun menilai bahwa Presiden Jokowi kurang cepat dan kurang berani mengambil resiko dalam langkah-langkah penanggulangannya.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena kedepannya masih akan ada beberapa penelitian tentang kepemimpinan seorang pemimpin khususnya pemimpin negara. Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kinerja presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi masalah, melalui takaran siyasah khususnya teori kepemimpinan Islam. Penelitian ini menitik beratkan pada terlaksana atau tidaknya fungsi-fungsi pemimpin yang terdapat dalam sistem kepemimpinan Islam. Oleh karena itu, kedepannya penelitian serupa masih perlu dilakukan lebih mendalam guna perkembangan khazanah keilmuan politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Imam, Munawwir. *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya: USAHA NASIONAL.

Karyo, Khatib Pahlawan. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, Jakarta: Amzah. 2005.

Khan, Qomarudin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Bandung: Pustaka ITB. 1983.

Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1993.

C. Lain-lain

1. Buku Umum

Alfian, M Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Pandji, Anoraga. *Psikologi Kepemimpinan*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992

Riberu, J. *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, cet. ke-4, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya. 1992.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers. 2006.

Soemarwoto Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Jembatan, 1983.

Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

2. Skripsi

- Alvira Iralita, Dessy. “Perilaku Politik Joko Widodo Sebagai Presiden dalam 100 Hari”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015
- Maszofi, *Konsep Pemimpin dalam Tafsir An-Nukat Wa Al-‘Uyun Karya Abu Hasan Bin ‘Ali Muhammad Al-Mawardi (975-1059)*, skripsi Fakultas Ushuludin, Jurusan Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Muhammad, Gunawan. *Karakter Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Imam Khomeini dan Al-Mawardi)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Wahyuni, Dwi. “Permasalahan Kabut Asap dalam Hubungan Indonesia dan Malaysia Pada Periode 1997-2006”, *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

3. Jurnal dan Surat Kabar

- Bahri, Samsul, “Kajian Penyebaran Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Sumatera Bagian Utaran Kemungkinan Mengatasinya Dengan Tmc,” (*Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*), Vol. 3, No. 2, 2002.
- M. Yusuf A. R. “Fenomena Kepemimpinan Politik Jokowi”, (*jurnal GaneÇ Swara*) Fak. Ilmu Sosial dan Politik Univ. 45 Mataram, Vol. 7, No.1. 2013.
- Putri, Rizca. “Bencana Tahunan Kabut Asap Riau dalam Pandangan Politik Hijau”, dalam (*JurnalPhobi*)Vol.1/ No.3/ 20 Maret. 2014.
- Rasyid, Fachmi, “Permasalahan dan Dampaka Kebakaran Hutan”,(*Jurnal Lingkungan Widyaiswara*), Edisi 1, No.4, 2014.
- Megandika,Wicaksono, “Presiden Siapkan Operasi Kemanusiaan”, *KOMPAS*, Sabtu 24 Oktober 2015.

4. Undang-Undang

- Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan/Lahan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Internet

<http://m.kompasiana.com>

<http://m.tribunnews.com/nasional/2015/10/25/tinggal-daerah-ini-yang-belum-terkena-kabut-asap-sumatera-dan-kalimantan.html>

<http://www.aktual.com/temui-jokowi-mentri-siti-minta-izin-padamkan-kebakaran-hutan-dengan-bom-kimia.html>,

<http://www.BBCIndonesia.html>,

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/08/22324041/Pemerintah.Siapa.Cabut.Izin.Perusahaan.Pelaku.Kebakaran.Hutan.dan.Lahan.html>

<http://UniversitasCiputraEntrepreneurshipOnline.htm>.

<http://beritagar.id/artikel/berita/operasi-kemanusiaan-korban-asap-dilakukan-seperti-operasi-militer.html>,

<http://berkarya.um.ac.id/2011/05/01/pemimpinan-dan-kepemimpinan-menurut-islam.html>

<http://CNNIndonesia.com>,

<http://kabutasap.info/2015/10/26/107>

<http://kangmasdyan07.blogspot.com/2013/01/model-kepemimpinan-m.hatta-24.html>,

<http://katadata.co.id/infografik/2015/12/17/rp-221-triliun-kerugian-akibat-kebakaran-hutan#sthash.AAwwmgqN.dpbs>,

<http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150915085007-92-78760/jokowi-cabut-izin-usaha-pembakar-hutan.html>,

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150906064500-20-7685/kabut-asap-kian-parah-pemerintah-akan-gelar-operasi-darurat.html>,

<http://m.kompasiana.com/kabut-asap-ancam-pariwisata-indonesia.html>

<http://m.okezone.com/read/2015/10/25/65/1237734/sembilan-instruksi-mendikbut-terkait-kabut-asap.html>,

<http://mongabay.co.id>,

<http://prokum.esdm.go.id>,

<http://TempoNasional.htm/Aturan-Ini-Izinkan-Pembakaran-Hutan-dan-Lahan>.

<http://us.news.detik.com/berita/3018955/inpres-jokowi-jauh-jauh-hari-mengapa-masih-ada-kebakaran-hutan-lagi.html>,

<http://www.akhbarislam.com/2013/07/pemimpin-menurut-islam.html>

http://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2015/10/151026_indonesia_kabuta_sap.html

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>.

<http://www.riauonline.co.id/mobile/2015/11/02/inilah-dampak-asap-bagi-dunia-pendidikan.html>,

<http://www.viva.co.id>,

<http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam-sejarah.html>.

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	BAB	FN	Terjemahan
1.	26	II	39	Berkata Balqis : “Sidang Mentriku! Berilah aku pertimbangan dalam urusan ini, aku tidak akan memutuskan sesuatu persoalan sebelum mendapat persetujuan tuan-tuan.
2.	26	II	40	Mereka menjawab : “Kita mempunyai kekuatan dan semangat perang yang cukup, dan urusan ini terserah pada baginda; sebab itu baginda pikirkanlah apa yang hendak baginda perintahkan.
3.	27	II	42	Yang suka mendengar perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Itulah orang-orang yang dipimpin Allah dan itu pulalah orang-orang yang mengerti.
4.	30	II	46	Engkau yang mengawasi mereka dan Engkau pulalah yang menyaksikan segala-galanya.

Daftar Dasar Hukum Pembakaran Lahan

1. Pasal 69 ayat (1) Point “h” Undang-Undang No. 32 Tahun 2009



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII . . .

2. Pasal 4 ayat (1, 2, & 3) PerMen LH No.10 Tahun 2010

Pasal 3

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
- (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- (2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

BAB III

PENGLOLAAN AIR DI LAHAN GAMBUT

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan gambut wajib:
 - a. menerapkan standar teknik pengelolaan air; dan
 - b. memiliki rencana kerja tahunan.
- (2) Standar teknik pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. peta lokasi dan peta kerja;
 - b. peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka;
 - c. rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan sistem kanal tertutup dengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air; dan
 - d. rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan sumur bor dan tandon air.

3. Pasal 1 ayat (1, 2, 3, & 4) PerGub Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2010

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN BAGI MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Bupati/Walikota.
- (3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan dibawah 5 Ha, diimpahkan kepada :
 - a. Camat, untuk luas lahan diatas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
 - b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan diatas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
 - c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha.
- (4) Pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama :
 - a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
 - b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha.
- (5) Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Mengisi Formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data Indeks resiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas), Indeks Peringkat Numerik Cuaca Kebakaran atau Fire Weather Index (FWI) dan atau Peringkat Numerik Potensi Kekeringan dan Asap atau Drought Code (DC); dan atau jarak pandang yang berada diwilayahnya berdasarkan data dari instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- (7) Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur mengumumkan status "BERBAHAYA" berdasarkan Indeks Kebakaran dan atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sampai tingkat kebakaran dan atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.

4. Pasal 9 ayat (4 & 5) PerGub Riau No. 11 Tahun 2014

- (2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU/miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.
- (3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membuang puntung rokok atau aktivitas penyalaaan api di kawasan hutan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib menyiapkan perangkat/ sarana/prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan antara lain :
 - a. Organisasi Regu Pemadam Kebakaran (RPK)
 - b. Protap/SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan/lahan
 - c. Peralatan pemadaman kebakaran yang memadai
 - d. Menara Pengawas Api
 - e. Menyediakan embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman
 - f. Peta rawan kebakaran hutan/lahan
 - g. Membuat sekat bakar
 - h. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar HGU
- (2) Setiap orang/penggarap lahan yang memiliki lahan ≥ 2 ha, wajib membentuk Organisasi Tim Anti Api dan menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran.
- (3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kebakaran hutan/lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja (kelalaian) atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.
- (4) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib memiliki ijin tertulis dalam pembukaan lahan untuk pembangunan/pengembangan usaha dari Aparat yang berwenang tanpa dipungut biaya apapun.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan luas lahan yang akan dibuka yaitu :
 - a. Lahan dengan luas antara 0-2 ha, oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - b. Lahan dengan luas antara > 210 ha, oleh Camat setempat.
 - c. Lahan dengan luas antara $> 10-50$ ha, oleh Bupati/Walikota setempat.
 - d. Lahan dengan luas > 50 ha, oleh Gubernur Riau.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Daftar Data Berita Online dan Koran

HOME POPULER **NASIONAL** FAKWISATA OPINI GAYA HIDUP ARTS

BLOG YOU ARE AT: Home » 2015 » September » 15 » Inpres Jokowi Jauh-Jauh Hari, Mengapa Masih Ada Kebakaran Hutan Lagi?



Inpres Jokowi Jauh-Jauh Hari, Mengapa Masih Ada Kebakaran Hutan Lagi?

SEP 15, 2015 emmy

MORAL-POLITIK.COM - Sebagian Sumatera lumpuh

DAFTAR / MASUK Ketikkan kata kunci Cari

CNN Indonesia

Home Politik **Nasional** Internasional Bismillah Hukum Gaya Hidup

ONE STOP ONE PAGE ONE NEWS MULTI PLATFORM

Home / Nasional Berita Peristiwa

Kebakaran Hutan Meluas, Bom Air Dilepaskan di Riau

Harry Amijaya, CNN Indonesia | Jumat, 31/07/2015 14:29 WIB

Sebarikan:   



Dapatkan berita terkini di gadget Anda

Download aplikasinya di: 

Minggu, 06/09/2015 06:45

Kabut Asap Kian Parah, Pemerintah Akan Gelar Operasi Darurat

Reporter: Lady Malino & Dono Purwanto, CNN Indonesia



Selasa, 15/09/2015 08:50

Jokowi: Cabut Izin Usaha Pembakar Hutan

Reporter: Agust Supriadi, CNN Indonesia



TUTUP

viva.co.id

Cari Beritamu di Sini ...

Selasa, 13 Oktober 2015

BERITA

BOLA

LIFE

BLOG

FORUM

OTOMOTIF

VIDEO

MORE

INDEKS

NASIONAL

Sembilan Langkah Jokowi Atasi Bencana Asap

Jokowi menetapkan langkah-langkah mengatasi bencana asap.

Oleh : Dedy Priatmojo, Agus Rahmat

Senin, 7 September 2015 | 21:01 WIB



ed up pagead2.googleyndication.com...

Home Tentang Kontak Mongabay.com



MONGABAY.CO.ID

Cari

Situs Berita dan Informasi Lingkungan

READERSBLOG

HUTAN HUJAN

DEFORESTASI SISTEM

LINGKUNGAN HIDUP

LAUT

FOTO

HUTAN

PARA PENJAGA HUTAN

Kabut Asap Makin Parah, Jokowi Akhirnya Blusukan ke Kalteng

September 24, 2015 Jenito dan Sapariah Satuni



Tentang Mongabay

Mongabay.co.id merupakan situs berbahasa Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan berita mengenai lingkungan
-Mongabay Indonesia



Kabut asap: Presiden minta bantuan empat negara

8 Oktober 2015

Kini



Berita Utama

Majalah Playboy akan berhenti memuat foto perempuan telanjang

Pihak penerbit mengatakan majalah porno tidak lagi mengutamakan secara komersial karena internet telah membuat ketelanjangan menjadi "hal biasa"

13 Oktober 2015

Protes UU senjata, mahasiswa Texas bawa dildo ke kampus

13 Oktober 2015

Belanda akan rilis hasil investigasi penyebab jatuhnya MH17

13 Oktober 2015

Majalah



ER 2015 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Harga eceran Rp 4.800,-

la	HAL 2		Baca "Kompas" Minggu Besok Dulu, bahan hiburan menyerah melalui jalur tradisional, seperti radio, televisi, dan pagelaran teater. Kini, didominasi bahan gaul menyerah secara massal melalui platform digital. Tinjapalah tradisi, singkatan, lelu, serta dikritisi yang menggohol dan memusnahkan budaya baru. Ciptakan... Baca Ciptaan-nya Chitra.		70 Tawanan NIS Dibebaskan Puluhan anggota pasukan khusus Amerika Serikat dan Irak, Kamis (22/10), menyerah. Bargaining di Irak utara dan membebaskan 70 tawanan Irak yang dipertahankan Nusra dalam di Irak dan Suriah. Seorang tentara AS tewas, korban meninggal pertama AS sejak perang melawan ISIS.
rubur Gambut	HAL 14				
ngki Tewas	HAL 15				

INTERNASIONAL/ HAL 10

Presiden: Siapkan Operasi Kemanusiaan

KRI untuk Evakuasi Dikerahkan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyerukan penyelamatan korban kebakaran lahan secara massif. Penyelamatan dilakukan dengan mengevakuasi warga ke kantor pemerintahan terdekat, fasilitas umum, ataupun kapal perang yang digerakkan mendekati lokasi kebakaran.

Langkah ini dilakukan agar dampak kebakaran yang dirasakan warga tidak semakin memburuk. "Saya menaruh perhatian agar penanganan lebih fokus dan

Jadi Apa **HAL 18, 19, DAN 22**

CURRICULUM VITAE

Nama : APRILLIA AYU SAPUTRI

Tempat Tanggal Lahir : Batam, 03 April 1993

Alamat : Jl.Janti Gang.Kruing No.25 RT 11 RW 05
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Agama : Islam

Jurusan/Fakultas : Siyasah/Syari'ah dan Hukum

E-mail : aprillia.ayu93@gmail.com

No Hp : 085 642 378 030

Pengalaman pendidikan :

- SD Negeri Adisucipto I
- SMP Negeri 4 Depok
- SMK Karya Rini Yogyakarta
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta